



MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK

PILKADA dan Permasalahannya

Refleksi Diskriminasi Jender dalam Pilkada Langsung
Sri Endah Nurhidayati

**Perjuangan dan Peran Perempuan
di DPRD Jawa Timur 2004 - 2009**
Wahidah Zein Br Siregar

Gerakan Perempuan dan Partisipasi Politik
Pinky Saptandari

**Memperbincangkan Kembali
Teori Negara Pembangun**
Kacung Marijan

**The Bottom-up Approach within Urban Poverty Alleviation
Strategies and Its Constraints**
*A Theoretical Perspective with A Special Reference
to the Indonesian Context*
Sulikah Asmorowati

**Lansia dalam Upacara Adat Batak
Mempertahankan Citra dan Jatidiri**
Meutia Farida Swasono

**Pengelolaan Perusahaan yang Baik
(Good Corporate Governance)**
Toto Warsoko Pikir

MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK

Diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, sebagai terbitan berkala tiga bulan sekali yang menyajikan tulisan-tulisan untuk lebih mempopulerkan ilmu kemasyarakatan ke tengah khalayak peminat dan untuk membuka forum belajar-mengajar yang lebih efektif

Pemimpin Umum

Hotman M. Siahaan

Wakil Pemimpin Umum

I. Basis Susilo

Penanggungjawab

Kris Nugroho

Dewan Redaksi

Soetandyo Wignjosoebroto (Unair)

Ramlan Surbakti (Unair)

Daniel Theodore Sparringa (Unair)

Mohtar Mas'ood (UGM)

Ashadi Siregar (UGM)

Herudjati Purwoko (Undip)

Edy Suhardono (Ubaya)

Pemimpin Redaksi

Doddy S. Singgih

Sekretaris Redaksi

Harijono

Redaksi Pelaksana

Bagong Suyanto

Yuyun Wahyu Izzati

Helmy Prasetyo

Produksi dan Pemasaran

Herwanto

STT No. 841/SK/Ditjen PPG/STT/1981

ISSN 0216-2407

Alamat Redaksi : FISIP Unair Jl. Airlangga 4-6 Surabaya 60286, Indonesia

Telepon: 03 1-5034015, Fax: 031-5022492

e-mail: mkp@sby.centrin.net.id

PENGANTAR REDAKSI

Pada bulan-bulan ini beberapa KPUD menyelenggarakan hajatan lanjutan —setelah KPU pusat melaksanakan pemilihan langsung paket Presiden dan Wakil Presiden— yaitu mengadakan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) secara langsung. Atmosfer yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilihan yang demokratis dan langsung menyentuh masyarakat diharapkan mampu meningkatkan derajat partisipasi masyarakat dalam bidang politik. Sebagaimana diketahui, bahwa pada masa lalu pemilihan pimpinan daerah seringkali tidak mampu menjawab permasalahan daerah, hal ini disebabkan sosok pimpinan atau kepala daerah bukan berasal dari daerah tersebut atau bahkan masyarakat pemilih tidak tahu menahu terhadap calon pemimpinnya. Ibarat kata “bagai memilih kucing di dalam karung” idiom ini tepat untuk menggambarkan kondisi riil di daerah sebelum digulirkannya Pilkada ini.

Harapan positif dan keadaan yang makin demokratis disandarkan pada Pilkada yang ternyata pada akhirnya tidak lebih baik dari masa lalu ketika pemilihan kepala daerah berdasar pilihan partai politik yang notabene adalah amanat masyarakat. Warna-warni Pilkada turut menyadarkan kita bahwa pada hakikatnya masyarakat masih belum interest terhadap proses tersebut, apalagi pilihan masyarakat pada calonnya tidak dapat memecahkan permasalahan daerah bahkan meninggalkan masyarakat pemilihnya untuk tujuan, motif pribadi dan politik. Antusiasme pemilih dapat dilihat dengan makin maraknya prosentase golput yang kian meningkat dari berbagai daerah pemilihan, hal ini merupakan sinyal kuat bahwa Pilkada masih belum mampu memobilisasi pemilih untuk aktif, apalagi tuntutan praktis kehidupan sehari-hari masyarakat makin menghimpit serta janji-janji pada masa kampanye bakal calon pemimpin daerah kerap disalahgunakan ketika pimpinan tersebut sudah berhasil memangku jabatan yang diimpikannya.

Tulisan-tulisan yang masuk di meja redaksi pada dasarnya adalah refleksi serta evaluasi dari hasil Pilkada yang telah berlangsung, antara lain: dari sisi partisipasi gender tulisan Sri Endah Nurhidayati tentang Refleksi Diskriminasi Gender dalam Pilkada Langsung, kemudian Perjuangan dan Peran Perempuan di DPRD Jawa Timur oleh Wahidah Zein Br Siregar, disambung dengan Gerakan Perempuan dan Partisipasi Politik oleh Pinky Saptandari, dari sisi politik Kacung Marijan mengulas Teori Negara Pembangun, dari sisi administrasi The Bottom-Up Approach within Urban Poverty Alleviation Strategies and Its Constraints dikupas Sulikah Asmorowati, pada topik lain Lansia dalam Upacara Adat Batak ditulis oleh Meutia Farida Swasono, dan Pengelolaan Perusahaan yang Baik oleh Toto Warsoko Pikir

Semoga kehadiran jurnal ilmiah *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* ini dapat memberikan alternatif pemecahan masalah sekaligus menjadi media interaksi yang dapat menjembatani para ahli, ilmuwan sosial, pemerhati masalah sosial-politik dan berbagai pihak terkait dalam mengkomunikasikan gagasan serta ide untuk pembangunan serta perkembangan masyarakat yang senantiasa berubah.

Redaksi

Topik Utama Edisi No. 4 (Oktober) 2005:
Dampak Kenaikan BBM

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi

iii

Daftar Isi

v

Refleksi Diskriminasi Jender dalam Pilkada Langsung

Sri Endah Nurhidayati

1

Perjuangan dan Peran Perempuan di DPRD Jawa Timur

2004 - 2009

Wahidah Zein Br Siregar

13

Gerakan Perempuan dan Partisipasi Politik

Pinky Saptandari

27

Memperbincangkan Kembali Teori Negara Pembangun

Kacung Marijan

41

**The Bottom-up Approach Within Urban Poverty Alleviation
Strategies And Its Constraints**

*A Theoretical Perspective with A Special Reference
to the Indonesian Context*

Sulikah Asmorowati

53

**Lansia dalam Upacara Adat Batak
Mempertahankan Citra dan Jatidiri**

Meutia Farida Swasono

75

**Pengelolaan Perusahaan yang Baik
(Good Corporate Governance)**

Toto Warsoko Pikir

93

GERAKAN PEREMPUAN DAN PARTISIPASI POLITIK

Pinky Saptandari

Dosen Jurusan Antropologi dan
Kepala Laboratorium Antropologi FISIP Unair, Surabaya

Abstract

Woman organizational prospect and potency in making up woman political participation can be optimalized if supported by the existence of movement with representing strong political commitment of government, political party, woman organization, and also society role. A political commitment which based on the existence of awareness confess that the raise of woman political participation represent immediate effort to support acceleration of democratic political process in Indonesia.

Keywords: *woman political participation.*

Membahas gerakan perempuan serta partisipasi politik perempuan di Indonesia pada masa kini, tidak dapat dilepaskan dari peran tokoh-tokoh serta organisasi perempuan dalam perjuangan bangsa Indonesia di masa lampau. Sebut saja beberapa nama seperti Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika, Maria Ulfah, Suwarni Pringgodigdo, SK Trimoerti, dan masih banyak lagi. Dengan mempelajari sejarah ketokohan para perempuan yang aktif dalam pergerakan politik akan memberi gambaran secara utuh, gerakan perempuan pada masa lampau dan relevansinya dengan kondisi masa kini dan masa depan. Gerakan perempuan di Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari adanya gerakan perempuan di Eropa di tahun 1968/1969,

di mana muncul adanya kesadaran bahwa di abad 19 dan di awal abad 20, telah ada satu gerakan perempuan. Dalam buku yang ditulisnya, Mies (2005) mengakui bahwa keterlambatan kesadaran tersebut sebagai akibat dari penulisan dan pelajaran sejarah yang dimanipulasi.

Apa yang ditemukan di Eropa juga terjadi di Indonesia. Catatan sejarah tentang ketokohan dan kepahlawan perempuan, serta gerakan-gerakan perempuan tidak banyak dimunculkan. Sulit untuk mendapatkan data yang lengkap tentang tokoh dan organisasi perempuan yang berperan aktif dalam gerakan perjuangan bangsa. Untuk mendapat informasi yang lengkap tentang sejarah gerakan perempuan, dibutuhkan upaya pencarian khusus untuk mendapatkan

gambaran yang lengkap tentang sejarah pergerakan para tokoh serta organisasi perempuan. Menjadi pertanyaan, mengapa ketokohan perempuan tidak tercatat secara lengkap dan utuh dalam buku-buku sejarah formal? Karena para penulis sejarah, serta mereka yang berkuasa membuat kebijakan dalam penulisan sejarah pada umumnya adalah laki-laki yang berada dalam pengaruh budaya patriarki yang amat kuat. Tidak mengherankan bila sejarah disebutkan sebagai suatu penulisan cerita versi laki-laki. Dapat diamati bagaimana penggambaran perjalanan hidup dan sisi keteladanan seorang tokoh seringkali mendapat muatan kepentingan politik penguasa pada masanya, sehingga banyak terjadi berbagai bias, termasuk terjadinya bias jender dalam penulisan sejarah. Bagaimana penggambaran peran perempuan dan organisasi perempuan dalam penulisan sejarah? Sangat minim dan nyaris tak berimbang dibandingkan dengan peran laki-laki dalam sejarah. Tulisan tentang peran perempuan dalam sejarah formal, selain minim juga banyak mengalami proses reduksi, bahkan dalam berbagai kasus juga mengalami pemutar-balikan fakta sebagaimana yang dialami oleh organisasi Gerwani (baca: Weiringa, 1999). Oleh karena itu, pendokumentasian dan penyusunan sejarah yang berdasarkan dengan kenyataan, menjadi sebuah kebutuhan penting bagi gerakan perempuan di masa depan (Mies, 2005).

Bias Jender dalam Penulisan Sejarah

Bias jender dalam penulisan sejarah dapat kita temukan dengan sangat mudah,

sebagaimana yang dialami oleh Raden Ajeng Kartini. Sebagai perempuan yang sangat cerdas, ternyata dalam penulisan sejarah lebih banyak ditonjolkan pada sisi keperempuanannya saja daripada sisi intelektualnya. Gambaran tersebut begitu melekat, sehingga semua orang mengenal Raden Ajeng Kartini dari sisi fisiknya semata sebagai perempuan yang berkonde dan berkebaya. Sedangkan kecerdasan pikiran Raden Ajeng Kartini, tidak banyak dimunculkan. Penggambaran semacam itu tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sosial yang berlaku dalam masyarakat pada masa itu (juga masa kini?) yang masih menunjukkan adanya kecenderungan untuk menempatkan sosok perempuan dalam konteks pembatasan-pembatasan yang dianggap sesuai dengan kodratnya sebagai perempuan. Karena konstruksi sosial semacam itulah menjelaskan mengapa yang banyak ditampilkan adalah Kartini sebagai sosok perempuan domestik dengan kegiatan kerumahtanggaan seperti menjahit, menyulam dan memasak. Sebaliknya, peran dan minat Kartini di ranah publik yang luar biasa hebatnya seperti dalam bidang kesenian, pertanian, perburuan dan lain-lain, tidak banyak dimunculkan dalam penulisan sejarah formal. Sifat kemanusiaan serta kepedulian Kartini dalam bidang kemasyarakatan diungkapkan secara lengkap dalam buku Pramudya, yang berjudul Panggil aku Kartini saja. Tulisan-tulisan tentang Kartini adalah contoh bagaimana sejarah formal Indonesia sangat bias jender. Pasti masih banyak lagi ketokohan dan kepahlawanan perempuan yang tidak terekam dan dituliskan dalam sejarah Indonesia.

Demikian juga dengan peran berbagai organisasi perempuan yang

sebenarnya mempunyai arti penting bagi sejarah pergerakan bangsa, banyak yang luput, tidak ditulis dalam buku sejarah Indonesia. Para peneliti yang ingin mengetahui bagaimana peran perempuan dan organisasi perempuan dalam sejarah pergerakan bangsa harus bekerja keras untuk melengkapi data-data yang menggambarkan besarnya peran perempuan dan organisasi perempuan dari masa ke masa. Saskia Weiringa, seorang peneliti yang berasal dari Belanda menyebutnya sebagai upaya mengurai sejarah tersembunyi (*baca: disembunyikan*). Dengan memasukkan perspektif jender, Saskia Weiringa telah mengkaji ulang sejarah formal yang telah dibakukan oleh para penguasa selama ini, sekaligus juga melakukan dekonstruksi bangunan berpikir sebuah masyarakat dari rezim yang mempresentasikan dominasi “berpikir laki-laki”, dengan menghasilkan penelitian disertasi Gerakan dan Organisasi Kaum Perempuan dalam Perspektif Sejarah. Suatu kerja keras yang tidak hanya membutuhkan waktu panjang dalam melakukan pengumpulan data, namun juga harus menempuh resiko yang besar harus berhadapan dengan rezim yang berkuasa pada waktu itu (Weiringa, 1999).

Dalam penulisan sejarah, tokoh perempuan dan organisasi perempuan lebih sering ditampilkan dari sisi keperempuanan dengan isu-isu domestik daripada ikut serta terlibat dalam kegiatan politik mempengaruhi kebijakan publik. Benarkah tokoh perempuan dan organisasi perempuan hanya berminat terhadap isu domestik? Ternyata stereotipe tentang organisasi perempuan semacam itu tidak sepenuhnya benar. Dari berbagai dokumen ditemukan bahwa banyak

organisasi perempuan sangat peduli dan terlibat secara aktif dalam mempengaruhi kebijakan publik, seperti organisasi Isteri Sedar yang berdiri tahun 1932 dengan ketua Suwarni Pringgodigdo. Dalam kegiatan kongres Isteri Sedar pada tahun 1932 diserukan agar kaum perempuan Indonesia terjun dalam perjuangan untuk kemerdekaan nasional. Masih di tahun 1932, dalam kongres ke-2 Persatuan Perkumpulan Isteri Indonesia (PPII), mengangkat isu perjuangan melawan perdagangan perempuan, dengan memutuskan antara lain untuk mendirikan Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak (P4A). PPII memahami adanya hubungan langsung antara perdagangan perempuan dan pelacuran dengan kemiskinan penduduk tani, yang ketika itu dililit hutang amat berat, serta dengan kondisi kerja yang amat buruk bagi buruh perempuan pada umumnya sebagaimana dikutip oleh Weiringa dari buku Suyatin Kartowiyono (1977).

Informasi di atas menunjukkan bahwa pada masa itu organisasi perempuan tidak hanya berbicara tentang isu domestik dan hanya berskala lokal, namun juga ikut masuk ke wilayah publik dengan mempengaruhi kebijakan politik secara luas. Proses pendomestikasian isu gerakan perempuan terjadi setelah tahun 1965, setelah terjadinya peristiwa pemberontakan PKI. Bahkan dari kajian Saskia Weiringa (1999) ditemukan bahwa politik negara pada masa itu juga telah melakukan penghancuran martabat perempuan untuk kepentingan politik dibalik peristiwa 1965 sebagaimana dialami oleh organisasi Gerwani. Bagaimana peta organisasi perempuan di Indonesia setelah tahun 1965? Sen dan

Grown (dalam Holzner, 1997) mengklasifikasikan beberapa tipe organisasi perempuan di Dunia Ketiga, sebagai berikut:

1. Organisasi tradisional yang beorientasi pada pelayanan
2. Sayap perempuan dari partai politik
3. Organisasi buruh
4. Proyek perempuan dalam pembangunan
5. Organisasi akar rumput
6. Organisasi penelitian perempuan
7. Organisasi profesi perempuan

Dari klasifikasi tipe organisasi perempuan yang dibuat oleh Sen dan Grown tersebut, hampir semua tipe organisasi perempuan dapat dijumpai di Indonesia dengan keragaman dan kekhasan masing-masing. Di Indonesia banyak organisasi sayap perempuan dalam partai politik, terutama yang dimiliki oleh partai-partai besar yang berkuasa seperti Golkar, PDI-P, PKB, dan lain-lain. Pemerintah melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri Sudarsono Hardjosoekarto (Kompas, 13 Oktober 2005), menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyiapkan revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, yang akan mengatur keberadaan organisasi sayap dari partai politik. Juga akan dimasukkan pula aturan tentang kewajiban partai politik untuk melakukan pendidikan politik kepada kader-kadernya, karena selama ini belum ada landasan yang konkret mengenai pendidikan politik. Mudah-mudahan revisi Undang-Undang Partai Politik dapat memasukkan juga aturan bagaimana kewajiban partai politik untuk melakukan pendidikan politik bagi kaum perempuan untuk mendukung

implementasi pasal 65 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.

Organisasi buruh juga sangat beragam, didirikan dalam skala lokal, regional hingga nasional. Tidak sedikit juga organisasi buruh yang berjejaring dengan organisasi buruh internasional untuk menghadapi persoalan-persoalan mendesak yang menyangkut kelangsungan hidup hari ke hari. Masalah kenaikan upah, kebutuhan berbagai memperoleh berbagai tunjangan (makan, transport, dll), jaminan kesehatan, lingkungan kerja yang aman dan tidak membahayakan, dan masih banyak lagi yang menjadi fokus perjuangan organisasi masing-masing. PKK dapat disebutkan sebagai salah satu organisasi akar rumput yang tetap bertahan dan dirasakan bermanfaat bagi masyarakat hingga sekarang. Bahkan pada saat terjadi pergantian kekuasaan, dengan jatuhnya rezim Orde Baru, PKK mampu mereformasi diri dan diterima sebagai organisasi pemberdayaan keluarga yang mempunyai jangkauan luas sampai ke pelosok kampung. PKK mempunyai tugas yang sangat banyak dalam pemberdayaan masyarakat, seperti penyelenggaraan pelayanan Posyandu, yang belakangan banyak disorot dan disarankan untuk dilakukan revitalisasi karena mencuatnya kasus gizi buruk.

Pusat-Pusat Studi Wanita atau Pusat-Pusat Studi Jender yang tersebar di berbagai Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta merupakan contoh organisasi penelitian perempuan yang cukup besar perannya dalam memberi warna gerakan perempuan Indonesia pada era tahun 80-an. Berdasarkan penulisan dan pendokumentasian, di negara-negara

Eropa, terungkap kebenaran dalam Studi Perempuan yang menunjukkan bahwa Studi Perempuan bukanlah hasil kajian akademis. Studi Perempuan lahir dari aktivitas lapangan, antara lain dari kelompok feminis yang memiliki tujuan politik membebaskan perempuan dari dominasi, kekerasan dan eksploitasi yang dilakukan oleh patriarki (Mies, 2005). Pengklasifikasian beberapa tipe organisasi perempuan juga dilakukan oleh Sukanti Suryochondro (1984), yang sekaligus menunjukkan bahwa potret organisasi dan gerakan perempuan di Indonesia dari masa ke masa sangatlah beragam dan tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sosial yang berlaku pada masanya. Yang perlu dikaji bukan sekedar banyaknya atau beragamannya tipe organisasi perempuan, namun juga perlu diketahui sejauh mana keberadaan organisasi tersebut mampu memberdayakan kaum perempuan serta — tentunya — dapat mempengaruhi kebijakan politik pemerintah agar memberi perhatian kepada kepentingan kaum perempuan.

Data-data menunjukkan bahwa organisasi perempuan pada masa sebelum kemerdekaan mempunyai suara yang cukup lantang, dan diperhitungkan dalam percaturan politik. Apa yang terjadi dengan organisasi-organisasi perempuan Indonesia pasca tahun 1965? Mengapa pemerintah banyak melakukan intervensi, melakukan kontrol terhadap terhadap organisasi perempuan yang mengarahkan pada proses pendomestikasian gerakan perempuan? Kecenderungan pemerintah untuk memanfaatkan keberadaan organisasi perempuan sebagai bagian dari politik pemerintah semakin kuat terjadi pada masa Orde Baru. Keberadaan organisasi-organisasi perempuan yang

memiliki jumlah anggota besar, menjadi kelompok sasaran untuk mendukung dan melestarikan kepentingan politik penguasa yang memanfaatkan ideologi jender yang berlaku dalam masyarakat, di mana peran dan fungsi perempuan sebagai individu, atau sebagai bagian dari keluarga maupun masyarakat dikonstruksikan secara sosial atas dasar ideologi yang dominan. Apa yang dimaksud dengan ideologi jender? Ideologi jender dapat diartikan sebagai bagaimana laki-laki dan perempuan didefinisikan, dinilai, dipersepsikan, dan diharapkan untuk bertindak laku. Secara lebih konkrit ideologi jender adalah segala aturan, nilai-nilai, mitos, dan stereotipe yang mengatur hubungan antara perempuan dan laki-laki yang didahului adanya pembentukan identitas feminin dan maskulin. Ideologi ini dapat terbentuk pada berbagai tingkatan negara, komunitas, keluarga dan disosialisasikan melalui pranata pendidikan, media massa, dan lain-lain.

Ideologi jender mendefinisikan perempuan berkaitan dengan identitas femininnya yang seringkali disebut sebagai “kodrat perempuan”, yakni yang mencitrakan perempuan sebagai makhluk yang lemah-lembut, emosional, lebih cocok untuk mengurus anak, masak, dan tinggal di rumah. Sejak kecil perempuan dikonstruksikan dengan peran mitos dan stereotype yang berkaitan dengan identitas feminin tersebut. Kebiasaan pola asuh dan pendidikan yang diterima anak perempuan sejak kecil membuat perempuan dibatasi oleh konstruksi sosial. Adanya pembatasan-pembatasan sosial budaya membuat perempuan tidak banyak yang memiliki kesempatan untuk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat rumahtangga, di tingkat masyarakat, ataupun di tingkat negara.

Pendomestikan gerakan perempuan menyebabkan tidak banyak perempuan yang mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuan menjadi pemimpin di ranah publik. Hambatan ideologis maupun hambatan material inilah yang dihadapi kaum perempuan, yang menurut Moser (1989) adalah bagian penting perjuangan kesetaraan jender di negara-negara Dunia Ketiga, yaitu bagaimana caranya untuk mempertemukan antara kebutuhan jender secara praktis dengan kebutuhan jender secara strategis.

Hambatan ideologis berkaitan dengan nilai kepatutan, misalnya hanya laki-laki yang pantas menjadi pemimpin berkaitan dengan konsep laki-laki sebagai pencari nafkah utama (*breadwinner*). Kepemimpinan berkaitan dengan pengambilan keputusan politik yang dianggap hanya cocok untuk laki-laki, dan tidak untuk perempuan. Hambatan ideologis berupa nilai-nilai yang mendidik anak perempuan dan anak laki-laki secara berbeda sesuai dengan identitas atau label feminin pada perempuan dan maskulin pada laki-laki. Hambatan ideologis inilah yang menjadi akar masalah yang harus dibongkar bersama-sama. Muhadjir dan Tukiran (2001) menggunakan istilah Menggugat Patriarki, dalam bukunya yang sekaligus menjadi judul buku tersebut, untuk menunjukkan betapa kuatnya ideologi patriarki telah merasuk kesemua wilayah, termasuk dalam kebijakan yang berkaitan dengan mengendalikan jumlah penduduk melalui kontrol alat-alat reproduksi. Kontrol tersebut dilakukan antara lain melalui program Keluarga Berencana, dengan kelompok sasaran utama kaum perempuan.

Hambatan material berupa

rendahnya tingkat pendidikan perempuan, ketrampilan dan pengalaman perempuan. Perjuangan panjang Raden Ajeng Kartini untuk melepaskan perempuan dari belenggu pingitan dan membuat kaum perempuan melek huruf untuk mengurangi keterbelakangan masih harus terus diperjuangkan hingga saat ini. Realita kondisi perempuan tetap memprihatinkan. Ditandai antara lain dengan masih tingginya angka kematian ibu (AKI), yang mencapai angka 273 per 100.000 kelahiran. Tingginya angka buta huruf (14%). Rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (43,5%) dibanding laki-laki (72,6%). Rendahnya tingkat keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif (DPR), yang masih di bawah sepuluh persen (9,8%).

Dengan kondisi seperti itu, perjuangan kaum perempuan untuk melawan ketidaksetaraan dan ketidakadilan masih sangat relevan. Walaupun juga harus diakui bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya, seperti membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan, yang sudah beberapa kali berganti nama sejak tahun 1978. Sejak akhir tahun 1990-an, Kementerian Pemberdayaan Perempuan menggunakan *Gender And Development* (GAD) sebagai pendekatan baru dalam pembangunan yang berperspektif jender. Dalam rangka merealisasi GAD inilah kemudian dikembangkan strategi Pengarus-Utamaan Gender (PUG). PUG merupakan strategi untuk menjamin bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, dan proyek di seluruh sektor pembangunan telah memperhitungkan dimensi jender, yaitu melihat laki-laki dan perempuan sebagai

pelaku yang setara dalam akses, partisipasi dan kontrol atas pembangunan serta dalam memanfaatkan hasil pembangunan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2003).

Pemerintah juga telah berusaha membuat perubahan peraturan, antara lain dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, pada pasal 65 dicantumkan tentang perlunya ada quota 30% bagi perempuan dalam kursi legislatif. Atas desakan dan dukungan dari berbagai organisasi perempuan, pemerintah juga telah berhasil membuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tantangan yang dihadapi organisasi perempuan untuk memperjuangkan kaumnya akan semakin berat karena berbagai kendala, sosial budaya, ekonomi, dan politik. Kenaikan harga BBM tanggal 1 Oktober 2005 memicu percepatan proses pemiskinan yang pasti akan menambah berat beban kaum perempuan. Inilah tantangan riil yang harus dijawab oleh organisasi dan gerakan perempuan masa kini, antara lain adalah berjuang untuk melawan kemiskinan ditengah-tengah dominasi ideologi patriarki.

Prospek dan Potensi Perempuan

Bagaimana prospek dan potensi perempuan dalam politik Indonesia? Secara kuantitas dan juga secara kualitas sebenarnya kaum perempuan merupakan potensi yang kalau diberdayakan akan bermanfaat untuk memperbaiki kondisi bangsa dan negara. Dalam kondisi masyarakat yang tidak ideal, di mana krisis multidimensi masih saja berlanjut sampai

dengan hari ini, program pemberdayaan perempuan sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat merupakan suatu hal yang tak dapat ditawar-tawar lagi dan harus terus berlanjut. Pemberdayaan perempuan dapat dilakukan dengan 2 (dua) strategi yakni: melalui kegiatan pengorganisasian dan pendidikan. Pengorganisasian dan pendidikan bagi perempuan diharapkan dapat membuat kaum perempuan sadar politik, mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pendidikan dan organisasi ada 2 (dua) tujuan yang dapat dicapai kaum perempuan, yakni: (1) mencari solusi pemecahan, dan (2) mempunyai unsur meningkatkan kesadaran pengetahuan, dan ketrampilan. Banyak metode, strategi yang dapat dipergunakan untuk melakukan pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk politik. Melalui kerangka pemberdayaan yang ditawarkan Sarah Longwe, dapat dilakukan upaya pemberdayaan perempuan yang meliputi 5 (lima) tingkatan pemerataan, yakni: (1) pemerataan tingkat kesejahteraan, (2) pemerataan tingkat akses, (3) pemerataan tingkat kesadaran, (4) pemerataan tingkat partisipasi, (5) pemerataan tingkat kontrol/kekuasaan. Melalui aktivitas berorganisasi, kaum perempuan mendidik dirinya maupun orang lain untuk mencapai tingkat pemerataan yang tertinggi, yakni pemerataan kontrol atau kekuasaan. Dengan pemerataan tingkat kontrol atau kekuasaan kaum perempuan diharapkan mempunyai posisi tawar, serta mempunyai kemampuan mengambil keputusan bagi dirinya maupun orang lain.

Untuk membongkar ideologi yang

dominan banyak hal yang harus dilakukan. Mengubah peraturan perundang-undangan yang bias jender merupakan salah satu upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan jender. Sebagaimana dapat kita lihat dalam pembuatan beberapa Undang-Undang yang memasukkan perspektif jender. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-Undang Pemilu khususnya dalam menjalankan amanah pasal 65 yang bermaksud untuk mendorong tercapainya quota 30% bagi keterwakilan perempuan dalam parlemen. Dalam pasal 65 ayat (1) disebutkan bahwa setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Kenyataan menunjukkan bahwa target quota 30% belum dapat tercapai dalam Pemilu tahun 2004. Apapun hasilnya, Pemilu 2004 setidaknya dapat menjadi proses pembelajaran bersama dalam menyongsong Pemilu-pemilu di masa depan. Bagi kaum perempuan keberadaan Undang-Undang tersebut merupakan peluang untuk menunjukkan kemampuan dalam bidang politik. Bagi partai politik menjalankan amanah pasal 65 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 merupakan suatu keniscayaan, sesuatu yang tak dapat ditawar-tawar lagi sebagai upaya untuk mewujudkan proses politik yang demokratis. Proses politik yang demokratis antara lain dibangun atas dasar partisipasi politik seluruh komponen, termasuk perempuan yang jumlahnya lebih dari separuh jumlah penduduk.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partai politik masa depan adalah partai yang memperhatikan kepentingan kaum perempuan sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang.

Perjalanan panjang dalam penyusunan dan menghasilkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT dapat dipakai sebagai cermin bagaimana proses untuk mewujudkan peraturan perundangan yang berperspektif jender bukanlah pekerjaan yang mudah. UU PKDRT merupakan produk kerja eksekutif dan legislatif yang dapat terwujud karena dikawal secara ketat oleh para aktivis perempuan yang tergabung dalam berbagai organisasi maupun lembaga perguruan tinggi, sejak usulan, *draft* hingga perumusannya. Payung hukum memang dibutuhkan untuk mencapai perubahan mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan berkesetaraan jender. Namun hukum saja tidak cukup untuk membuat perubahan apabila tidak didukung adanya kemauan baik semua pihak: pemerintah, akademisi, partai politik, kelompok masyarakat, maupun kaum perempuan. Perlu adanya paradigma baru yang mengacu pada pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dan pentingnya partisipasi politik kaum perempuan. Pembangunan berwawasan jender merupakan suatu kebutuhan dalam setiap aspek pembangunan. Untuk mewujudkan suatu pembangunan berwawasan jender dibutuhkan adanya kesetaraan peran laki-laki dan perempuan, artinya dibutuhkan adanya partisipasi politik secara seimbang antara laki-laki dan perempuan. Memasukkan isu kesetaraan jender dalam pembangunan terus-menerus diperjuangkan, dalam skala lokal, regional, nasional maupun jaringan internasional.

Dalam suatu pertemuan Forum Kebijakan di tingkat negara-negara Asean pada tanggal 18-19 Agustus 2005 yang diselenggarakan oleh Asian Institute of Technology (AIT) di Bangkok, muncul kesepakatan politik untuk memasukan *gender equality* sebagai *cross cutting issues* dalam pembangunan lingkungan perkotaan. Komitmen internasional semacam itu, sebagaimana halnya komitmen-komitmen lain dalam mengatasi masalah lingkungan, masalah perdagangan perempuan dan anak, buruh migran, dan lain-lain perlu direspons dan ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh oleh pemerintah. Dalam hal ini, organisasi perempuan dapat ikut berperan untuk menyuarakan, merumuskan konsep dan strategi, serta melakukan monitoring serta evaluasi dalam implementasi komitmen-komitmen politik pemerintah.

Dalam konteks itulah, pemberdayaan perempuan menjadi isu yang amat penting sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat. Dengan gerakan pemberdayaan perempuan kesadaran politik perempuan ditingkatkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warganegara. Dibutuhkan strategi, metode, pendekatan yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan. Pertemuan demi pertemuan telah dilakukan untuk mencari strategi yang tepat dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan. Dari berbagai pertemuan untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan, ditemukan berbagai strategi, antara lain adalah:

- (1) Sosialisasi politik melalui program pendidikan politik, pelatihan berorganisasi bagi kaum perempuan, latihan teknik untuk mengangkat isu-isu jender, dan pembentukan jaringan

kerja antara kelompok aktivis di dalam gerakan masyarakat, parpol-parpol, parlemen, dan media;

- (2) Langkah-langkah untuk memperkuat posisi perempuan yang sudah menduduki berbagai posisi, dengan: (a) memberikan pelatihan melakukan lobi-lobi yang efektif, berkampanye, dan teknik-teknik untuk mengidentifikasi para pendukung, (b) upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dengan mengembangkan ketrampilan staf, (c) mengembangkan kapasitas, dan memperluas basis dukungan bagi tokoh-tokoh perempuan yang terpilih, (d). melakukan kolaborasi antar perempuan anggota parlemen, parpol, akademisi, dan aktivis perempuan;
- (3) Lebih menonjolkan pentingnya dukungan bagi partai politik yang mempunyai komitmen memajukan kesetaraan gender melalui *platform* politik dan struktur intern partai mereka. Bantuan dapat berwujud pelatihan, pendampingan, dan lain-lain;
- (4) Menjajagi pembuatan *database* yang bertujuan: (a) mengidentifikasi tokoh-tokoh perempuan yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin di tingkat nasional maupun lokal, (b) mengidentifikasi tokoh-tokoh kunci yang akan dilibatkan dalam kampanye peningkatan partisipasi politik perempuan;
- (5) Ditujukan untuk mengawali program-program yang dirancang untuk: (a) menumbuhkan kesadaran politik serta meningkatkan pengetahuan perempuan kader potensial yang belum aktif di arena publik, (b) melibatkan media sebagai sebagai

partner bahkan juga salah satu pemain utama dalam tugas mendidik masyarakat dan menyebarluaskan informasi mengenai kesetaraan jender;

- (6) Strategi yang diarahkan untuk membangun dan memperkuat jaringan kerja perempuan anggota partai politik, parlemen, organisasi masyarakat, LSM, serta media. Kerjasama dengan media harus dijalin dalam rangka menampilkan citra dan sosok perempuan sebagai aktor politik yang kredibel.
- (7) Strategi yang terakhir, berkaitan dengan dengan struktur politik secara umum. Langkah-langkah pemberdayaan perempuan dalam politik tidak hanya masuk dalam struktur politik formal, tetapi juga harus masuk ke dalam organisasi kemasyarakatan, gerakan sosial, serta kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

Berikut ini adalah beberapa rekomendasi cara-cara memperkuat partisipasi politik perempuan di masa depan, antara lain dengan:

- (1) Fokuskan perhatian pada partai politik, untuk membuat mereka lebih peka jender agar dapat meningkatkan jumlah kandidat perempuan di daftar partai, serta memberikan mereka peluang yang sama untuk berpartisipasi pada proses-proses pengambilan keputusan;
- (2) Perlu dilakukan penggalangan "massa kritis" yang terdiri dari organisasi-organisasi masyarakat yang mempunyai komitmen meningkatkan status perempuan, dan membantu mereka menumbuhkan

rasa senasib-sepenanggungan dengan tokoh-tokoh perempuan dari dunia politik, antara lain dengan: meningkatkan kegiatan kerjasama antara kelompok, memperkuat jaringan antara organisasi masyarakat dengan politisi perempuan, dan membantu langkah-langkah mereka untuk mempengaruhi jalannya pemerintahan lewat parlemen dan parpol-parpol, menempuh tindakan *affirmative action* untuk memperlancar pemberdayaan politik kaum perempuan, memperkuat jalinan kerjasama antar berbagai organisasi dengan berbagai komponen masyarakat, dan membantu mereka dalam menyelenggarakan pelatihan yang ditujukan bagi perempuan;

- (3) Disarankan untuk memanfaatkan lembaga-lembaga kultural dan keagamaan seperti Fatayat, Muslimat, Aisyah, Koperasi, dan lain-lain, untuk mensosialisasikan keberadaan dan kiprah politisi perempuan kepada masyarakat luas. Pendekatan ini sangat cocok diterapkan pada masyarakat pedesaan dan masyarakat marginal untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian mereka akan pentingnya peran perempuan dalam kehidupan politik;
- (4) Salah satu fokus penting yang berkaitan dengan peningkatan keterlibatan perempuan adalah dengan menggelar program-program yang menyentuh berbagai persoalan masyarakat untuk mempengaruhi jalannya pengambilan keputusan di tingkat masyarakat. Dengan mendorong munculnya tekanan

kelompok akar rumput terhadap pemerintahan di tingkat yang lebih tinggi. Pelatihan-pelatihan bagi kader-kader lokal akan meningkatkan kemungkinan para perempuan ini memegang peranan lebih besar di tingkat lokal hingga di tingkat nasional;

- (5) Disarankan untuk mengorganisir kelompok perempuan yang ada, sehingga mereka dapat memberi respons positif terhadap kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan, pengadaan air bersih serta sanitasi, dan mengaitkan inisiatif-inisiatif tersebut dengan upaya strategis yang lebih luas menuju pada peningkatan partisipasi politik perempuan;
- (6) Kelompok masyarakat perlu didorong untuk menggelar acara debat publik, menggelar kampanye advokasi untuk mendukung partisipasi politik kaum perempuan, dan menyediakan layanan-layanan manajemen organisasional dan latihan berkampanye, serta mencari sumber-sumber pendanaan kampanye bagi perempuan yang menjadi anggota organisasi sosial dan politik.

Gerakan Bersama

Peningkatan partisipasi perempuan dalam politik merupakan tantangan dan kebutuhan mendesak sekarang dan di masa depan, yang harus diwujudkan secara bersama-sama, pemerintah, partai politik, organisasi perempuan, dan masyarakat. Peningkatan partisipasi politik perempuan harus menjadi suatu gerakan masyarakat yang dilakukan secara terpadu, dengan melakukan pelibatan dan

peningkatan jaringan kerjasama dalam: (1) memanfaatkan peluang dan momentum, (2) menggalang kekuatan yang ada dalam masyarakat untuk melakukan jaringan kerjasama, dan (3) melibatkan media massa. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi dapat dimanfaatkan sebagai faktor pendorong percepatan peningkatan partisipasi politik perempuan. Kegiatan seminar, lokakarya, pelatihan yang didukung juga oleh banyaknya terbitan buku-buku atau modul pelatihan dapat dioptimalkan sebagai bagian dari upaya pemberdayaan perempuan di bidang politik. Buku panduan yang diterbitkan kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Pastikan Partai Anda Jadi Pilihan (2003), juga buku-buku panduan lain seperti yang disusun oleh Mahnaz Afkani & Haleh Vaziri (2001) dapat menjadi bekal bagi kaum perempuan mempersiapkan diri berpartisipasi aktif dalam politik.

Isu perempuan harus terus-menerus digulirkan sebagai isu publik untuk menggugah pembuat kebijakan, serta pengelola dana-dana pembangunan. Di sinilah arti penting partisipasi politik perempuan yang harus menjadi agenda bersama pemerintah, partai politik, organisasi perempuan, dan seluruh masyarakat. Menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD), menjadi calon kepala negara atau kepala daerah memang bukan satu-satunya cara untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan dan melahirkan kepemimpinan perempuan. Namun dapat dimanfaatkan sebagai arena untuk menunjukkan kemampuan perempuan dalam bidang politik serta sarana untuk memperjuangkan kepentingan perempuan

yang selama ini sering terabaikan. Dalam pemilihan umum tahun 2004, peningkatan keterwakilan perempuan dalam legislatif untuk mencapai quota 30% belum tercapai. Inilah tantangan dan Pekerjaan Rumah yang harus dijawab bersama, antara lain dengan melakukan persiapan-persiapan menghadapi Pemilu yang akan datang.

Peningkatan partisipasi politik perempuan dalam menghadapi Pemilu 2009 harus dipersiapkan sejak sekarang, karena partisipasi politik tidak mungkin dibangun secara *instant*, secara tiba-tiba sebagaimana yang terjadi dalam proses Pemilu 2004. Partisipasi politik perempuan harus dibangun dari tingkat yang paling bawah, mulai dari tingkat keluarga, kehidupan bermasyarakat, hingga tingkat negara, dengan proses bertahap dan berkesinambungan. Melalui aktivitas berorganisasi diharapkan dapat mendorong kemampuan perempuan sebagai pemimpin. Salah satu target penting dalam berorganisasi adalah pendidikan politik, yang memungkinkan kaum perempuan mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan terasah kemampuannya untuk menjadi pemimpin. Upaya pemberdayaan kaum perempuan akan tercapai apabila dilakukan dengan membuka akses mereka dalam dunia politik. Mengikuti proses perubahan politik negara dari waktu ke waktu merupakan bagian penting yang harus direspons oleh organisasi-organisasi perempuan, apapun tipe organisasinya. Seperti yang ditulis oleh Ratna Saptari tentang Isu Perempuan dalam Agenda Gerakan Buruh di Indonesia: Sebuah Refleksi Awal. Saptari mengkaji gerakan buruh pasca 1997, era reformasi, yang membantu kita untuk memahami arti

penting isu perempuan dalam masalah perburuhan. Kerentanan perempuan sebagai tenaga kerja tak dapat dilepaskan dari konstruksi sosial yang berlaku, dimana kapitalisme patriarki begitu kuat mempengaruhi kebijakan pemerintah maupun pelaku usaha. Diskriminasi upah masih saja dialami buruh perempuan, yang didasari pada asumsi bahwa laki-laki adalah pencari nafkah utama (*bread winner*) sehingga dianggap layak untuk menerima upah lebih besar daripada perempuan yang bekerja dengan jenis pekerjaan dan jam kerja yang sama. Buruh Perempuan juga sangat rentan mengalami pelecehan seksual, sebagaimana kasus paling ekstrim yang dialami oleh Marsinah buruh PT CPS yang berakhir dengan pembunuhan di tahun 1993. Kematian Marsinah menjadi simbol gerakan buruh maupun gerakan perempuan di Indonesia (Saptari, 2004).

Keterlibatan gerakan perempuan dalam sistem politik, tidak harus dilakukan dengan cara masuk menjadi anggota partai politik atau duduk menjadi anggota DPR atau DPD. Melalui keterlibatan dalam organisasi sosial kemasyarakatan, kaum perempuan dapat ikut serta mempengaruhi kebijakan publik. Sebagaimana yang dilakukan oleh Vandana Shiva dan Maria Mies, yang kemudian menuliskan keterlibatan aktif mereka dalam gerakan perempuan dan ekologi dalam sebuah buku. Dalam buku yang ditulis bersama-sama, Shiva dan Maria Mies (2005) melakukan analisis terhadap permasalahan lingkungan dari perspektif feminis. Agar dapat ikut serta memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak perempuan sebagai warga negara, sebagai ibu rumah tangga, sebagai buruh atau sebagai apapun, organisasi-organisasi perempuan

diharapkan dapat mengambil peran aktif melakukan proses pemberdayaan perempuan. Suatu proses pemberdayaan yang harus didasari pemikiran dan sikap kritis terhadap apapun yang terjadi, termasuk terjadinya pendomestikasian isu perempuan. Dalam buku tersebut, Shiva dan Maria Mies mencontohkan berbagai gerakan perempuan dalam isu lingkungan, seperti aksi protes yang dilakukan oleh perempuan India dalam peringatan bencana kebocoran gas di Bhopal. Mereka menuntut mantan direktur Union Carbide of India Ltd bertanggung jawab atas bocornya lima ton gas beracun yang telah menewaskan lebih dari 3000 jiwa di tahun 1984.

Dalam menjalankan misi pemberdayaan perempuan, langkah-langkah, metode, pendekatan yang digunakan gerakan perempuan boleh beragam, bahkan memang harus beragam sesuai dengan keaneka-ragaman permasalahan maupun wilayah. Apapun program yang dijalankan dalam rangka pemberdayaan perempuan, diharapkan dapat memberi dampak bagi perempuan untuk:

- (1) Meningkatkan akses dan kontrol di bidang organisasi dan politik;
- (2) Meningkatkan akses dan kontrol di bidang ekonomi;
- (3) Meningkatkan akses dan kontrol terhadap sumber informasi;
- (4) Meningkatkan kemampuan menjadi kelompok yang dapat membuat perubahan dalam masyarakat;

Selain itu, berbagai aktivitas pemberdayaan perempuan harus dapat analisis apakah laki-laki dan perempuan:

- (1) Memperoleh akses yang sama kepada sumber pembangunan;

- (2) Berpartisipasi sama dalam proses pembangunan, termasuk proses pengambilan keputusan;
- (3) Memiliki kontrol yang sama atas sumber pembangunan; dan
- (4) Memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan.

Dengan berpartisipasi aktif dalam proses politik, maka kaum perempuan tidak hanya ditempatkan sebagai penambah jumlah suara saja, tetapi benar-benar diperhitungkan kiprahnya sebagaimana yang pernah terjadi pada tahun-tahun sebelum kemerdekaan.

Penutup

Menjadi ibu rumahtangga ataupun berkarier di sektor publik bagi kaum perempuan merupakan pilihan cerdas, yang membutuhkan pemberdayaan diri agar mempunyai kontrol dalam mengambil keputusan penting bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Ini berarti bahwa perempuan tidak boleh a-politik, perempuan harus melek politik untuk dapat memperjuangkan diri sendiri maupun masyarakat. Aktif dalam kepengurusan organisasi sosial, budaya, keagamaan, ekonomi, maupun politik amat bermanfaat untuk menguji kemampuan sebagai pemimpin. Berdasarkan kajian sejarah — termasuk yang tersembunyi — diketahui bahwa kepemimpinan kaum perempuan telah terbukti mampu memberi pengaruh yang cukup besar untuk kepentingan kaum perempuan, keentingan masyarakat, maupun bagi bangsa dan negara.

Prospek dan potensi organisasi perempuan dalam peningkatan partisipasi politik kaum perempuan dapat

dioptimalkan apabila didukung adanya gerakan bersama yang merupakan komitmen politik yang kuat pemerintah, partai politik, organisasi perempuan, serta peran serta masyarakat. Suatu komitmen

politik yang didasarkan adanya kesadaran bahwa peningkatan partisipasi politik perempuan merupakan upaya yang harus disegerakan untuk mendukung percepatan proses politik demokratis di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Afkhami Mahnaz dan Haleh Vaziri, *Claiming Our Rights: A Manual for Women's Human Rights Education in Muslim Societies* (USA: Bethesda MD, Sisterhood Is Global Institute, 2001).
- Darwin Muhadjir dan Tukiran (ed.), *Menggugat Budaya Patriarki*, edisi 1, Seri Laporan Nomor 100 (Yogyakarta: Kerjasama Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada dengan Ford Foundation, 2001).
- Holzner, Brigitte, *Organisasi dan Partisipasi Politik Perempuan*, Bab IX dalam Saptari Ratna dan Brigitte Holzner, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial*, Sebuah Pengantar Studi Perempuan, cetakan 1 (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1977).
- Kartowiyono, Suyatin, *Perkembangan Pergerakan Wanita Indonesia* (Jakarta: Yayasan Idayu, 1977).
- Moser, Caroline, "Gender Planning in Third World: Meeting Practical & Strategic Needs", dalam *World Development*, volume 17 (Pergamon Press, 1989).
- Saptari Ratna, "Isu Perempuan dalam Agenda Gerakan Buruh Indonesia", dalam Arief W. Djati (ed.) *Gerakan Sosial dan Demokratisasi*, (Surabaya: Panitia 25 Tahun FISIP Universitas Airlangga, 2004).
- Shiva Vandana dan Maria Mies, *Ecofeminisme: Perspektif Gerakan Perempuan dan Lingkungan* (Yogyakarta: IRE Press, 2005).
- Suryochondro Sukanti, *Potret Pergerakan Wanita di Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1984).
- Wahyurini Ernanti, Abdul Azis Hoesein dkk, *Pastikan Partai Anda Jadi Pilihan* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2004).
- Weiringa, Saskia Eleonora, *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*, Penerjemah Hersi Setiawan (ed.), Stanley, cetakan 1 (Jakarta: Garba Budaya, 1999).